

DETERMINAN PENGANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Silvia Yunita Rakhma
Silviayunitar6@gmail.com
Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of budgeting determinant, internal system control, clarity of budget targets, and the use of information technology on the performance accountability of the Surabaya city government. This research used a quantitative method. The sample collection technique of this research used the purposive sampling technique. The purposive sampling of this research used respondents with specific criteria. Meanwhile, the information source were intentionally selected according to determined criteria. Meanwhile, the data collection technique of this research used survey methods with distributed questionnaires with structural questions. The analysis method of this research used multiple linear regressions analysis with SPSS application 24 version. The research result showed that budgeting determinant had positive effect on the Surabaya city government's performance accountability., internal system control had positive effect on the Surabaya city government's performance accountability, clarity of budget targets had positive effect on the Surabaya city government's performance accountability, and information technology had positive effect on the Surabaya city government's performance accountability.

Keywords: budgeting, internal system control, clarity of budget targets, the use of information technology, performance accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh determinan penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan untuk kriteria responden yang telah ditentukan. Informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah metode survey yang menggunakan media kuisioner dan didalamnya berisi tentang pernyataan - pernyataan yang terstruktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa determinan penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya.

Kata Kunci: penganggaran, pengendalian internal, kejelasan anggaran, teknologi informasi, akuntabilitas kinerja

PENDAHULUAN

Kondisi yang sedang dialami oleh seluruh dunia dimana saat ini sedang terjadi pandemi yang di sebabkan oleh *Corona Virus Desae* (COVID-19) tidak terkecuali di Negara Indonesia. Kondisi ini akan masih terus berlanjut bahkan pemerintah pun belum dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Dengan dialaminya pandemi COVID-19 di seluruh dunia

setiap negara telah membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah setempat yang tidak lain bertujuan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Desaeae* (COVID-19). Pemerintah Indonesia juga menerapkan beberapa kebijakan baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Pada kebijakan fiskal, Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. dengan itu Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres No.4/2020 yang memerintahkan seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang dapat membantu dalam kegiatan penanganan COVID-19. Pada kebijakan moneter yang diambil dan di terapkan haruslah selaras dengan kebijakan fiskal yang sudah terlebih dahulu diterapkan.

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengatur dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas otonomi daerah secara penuh, luas dan bertanggung jawab kepada daerahnya masing-masing. Disempurnakannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Diterapkannya peraturan perundang-undangan ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian dan dapat mengurus kepentingan daerahnya masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2018) Perwujudan *good governance* untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, tentulah diperlukan serangkaian reformasi yang ada dalam sektor publik, yaitu reformasi manajemen publik serta reformasi kelembagaan.dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dapat dinilai baik dibutuhkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban pemerintah yang transparan dan akuntabel (Putra, 2017).

Dalam Yani (2014) Akuntabilitas mempunyai arti pengungkapan dan pemberian informasi yang ada terhadap aktivitas-aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah untuk pihak yang berkepentingan pada pemerintah tersebut. Pernyataan tersebut selaras dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual seorang agen dengan prinsipalnya yang pada kasus ini yang berperan adalah pemerintah sebagai lembaga yang diberi amanah dan masyarakat menjadi sang pemberi amanah tersebut. Putra (2017) mengatakan pelaksanaan yang sesuai aturan akan sangat berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah dimana aturan tersebut ditetapkan dengan baik dan benar, akuntabilitas dapat mencapai optimalisasi yang baik melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan prosedur yang ada dan juga memenuhi kaidah akuntabilitas yakni ekonomis, efektif dan efisien yang harus diterapkan, tak hanya penganggaran berbasis kinerja yang harus di implementasikan namun penerapan sistem pengendalian internal yang baik juga harus ikut diimplementasikan sehingga sasaran penggunaan keuangan daerah dapat sesuai dengan apa yang akan dituju dan dapat dipertanggung jawabkan dengan semestinya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada seperti rendahnya kualitas pertanggung jawaban masih sering terjadi di kalangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya dengan rendahnya kualitas pertanggung jawaban ini akan membuka peluang untuk terjadinya penyelewengan dan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya. Di tinjau dari kondisi saat ini yang sedang terjadi pandemi dan susahya untuk berkomunikasi secara tatap muka guna mengurangi intensitas penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat terganggu, sehingga dapat menghambat kinerja pemerintah. Dengan adanya permasalahan-permasalahan ini penting untuk menciptakan perubahan dan juga inovasi yang kreatif di lingkup pemerintahan agar pelayanan yang ditujukan pada masyarakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap

akuntabilitas kinerja. Dengan adanya permasalahan yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah determinan penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya?, (2) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya?, (3) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya?, (4) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya?

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Putra (2017) mengatakan kewajiban pihak pemegang amanah atau biasa disebut *agent* untuk mempertanggung jawabkan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang telah dilaksanakan. Hal tersebut biasa dipahami sebagai akuntabilitas. Tugas daripada seorang *principal* adalah memberikan kewenangan terhadap *agent* untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Berkaitan dengan permasalahan keagenan, praktek dalam pelaporan keuangan organisasi sektor publik teori ini tentu konsepnya akan sesuai. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyajikan informasi yang informatif bagi para penggunanya guna menilai akuntabilitas dan digunakan sebagai landasan pengambil keputusan, baik keputusan sosial, ekonomi, maupun politik. Hubungan antara pemerintah dan pengguna informasi merupakan sebuah hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam kasus ini pemerintah sebagai *agent* atau pengelola bisnis, meskipun tidak secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya. Sebagai seorang agen pemerintah wajib menjalankan segala tugas untuk memberikan informasi apa yang menjadi kepentingan para prinsipalnya.

Determinan Penganggaran

Putra (2017) mengatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem yang mencakup tentang kegiatan penyusunan serta menjadi tolok ukur kinerja sebagai instrument pencapaian misi dan sasaran sebuah program yang ada. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan tentang pengimplementasian anggaran berbasis kinerja yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menggambarkan tentang upaya perbaikan pemerintah dalam mewujudkan penyusunan anggaran yang transparan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah yang ada.

Sofiani dan Retnani (2019) mengatakan bahwa prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu suatu bentuk penggabungan antara anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diharapkan atau ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dapat dipertanggung jawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja berorientasi dengan *output* pihak organisasi yang berdasar pada visi dan misi serta perencanaan strategi yang dimiliki oleh organisasi. Dengan demikian pengukuran pada sisi *output* oleh sebuah organisasi ialah indikator kinerja yang dilakukan saat proses pengalokasian anggaran atau sumber daya yang ada pada sebuah program kegiatan (Sofiani dan Retnani 2019). Sebagai simpulan, penganggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang disusun dengan menggunakan indikator kinerja, disajikan secara jelas dan sistematis dengan mengacu pada konsep *value for money* atau biasa disebut dengan konsep 3E sehingga pada pengimplementasiannya dapat dicapai efektif, efisien dan ekonomis serta dapat di jadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun ketahun secara periodik.

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses dimana seluruh kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara *continue* oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan terhadap

tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang menerapkan konsep *value for money* serta pengamanan atas asset negara dan suatu bentuk ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sistem pengendalian internal yang baik dapat diwujudkan dalam pengelolaan keuangan yang disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang di jalankan oleh sebuah organisasi pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat transparan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran ialah suatu gambaran kuantitatif tujuan organisasi dan digunakan sebagai media untuk menentukan kemajuan atautkah kemunduran dalam mncapai tujuan organisasi tersebut. Isnanto *et al.*, (2019) megatakan bahwa sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan hal-hal yaitu anggaran yang memiliki ciri yang jelas pada sasaran anggaran yang kan dituju, dimana hal ini dapat membantu untuk menyusun target anggaran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik secara otomatis akuntabilitas organisasi tersebut akan meningkat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya yang dengan baik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Abdullah, 2004 (dalam Putra, 2017) berkata pada dasarnya arah dan kebijakan umum anggaran daerah terdiri dari informasi tentang tujuan dan sasaranyang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan pada suatu tahun anggaran tertentu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai macam hal, teknologi dapat digunakan untuk mengolah data yang diperlukan, mencakup memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan bahkan untuk memanipulasi datapun juga bisa (Indrisari dan Nahartyo, 2008). Informasi yang baik ialah informasi yang relevan terhadap kondisi saat itu, akurat dan tepat waktu, dapat digunakan secara pribadi maupun bisnis dan pemerintahan yang dapat dijadikan sebuah dasar pengambilan keputusan untuk progres selanjutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan bahwa dalam penindak lanjutan terselenggaranya proses pembangunan yang searah dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah mempunyai kewajiban diantaranya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan IPTEK dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dalam hal mengelola keuangan daerah dan pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas serta mudah dipahami kepada publik atau masyarakat. Dalam pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan juga dapat mengoptimalkan kinerja satuan unit satu dan yang lainnya, sehingga dengan adanya teknologi informasi staf yang ertugas dapat bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Hal ini masih terus dikembangkan dengan harapan teknologi informasi dapat berguna untuk membantu proses pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dengan waktu yang singkat atau ekonomis.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

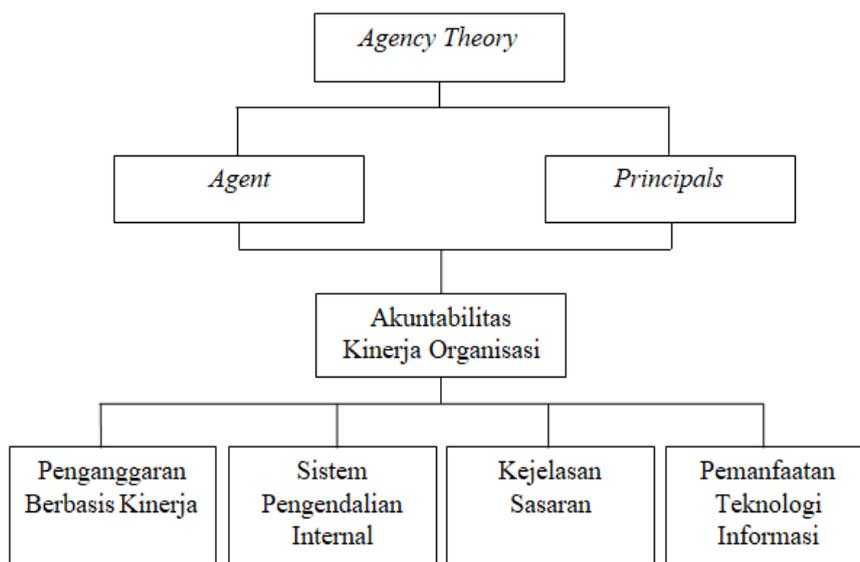
Putra (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan serta pengungkapan seorang pemegang amanah (*agent*) kepada pemberi amanah (*principals*). Hal ini yang tentu saja memiliki hak untuk menerima pertanggung jawaban atas apa yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ialah perwujudan suatu instansi yang menjadi kewajibannya unstuck melaporkan, member informasi serta mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan pernyataan

tersebut dapat disimpulkan apakah organisasi tersebut mengalami keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh *principals*-nya dan jawaban tersebut dapat digunakan menjadi bahan acuan evaluasi untuk kedepannya agar organisasi tersebut dapat lebih baik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

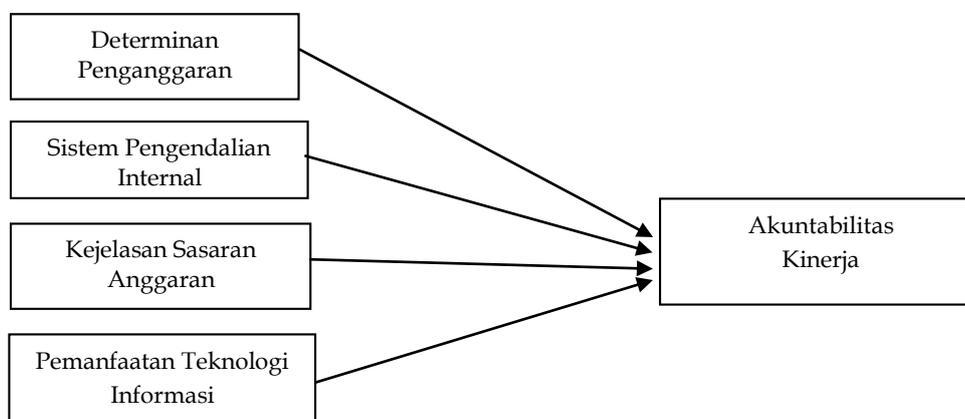
Menurut Pratiwi dan Setyowati (2017) mengatakan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas di dalam sebuah lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: (1) Harus mempunyai sistem yang dapat dijadikan sebagai penjamin penggunaan sumber daya yang konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada, (2) Tujuan dan sasaran yang jelas dan telah ditetapkan sebelumnya harus mampu ditunjukkan, (3) Berorientasi pada visi dan misi serta hasil yang akan diperoleh pada kegiatan, (4) Jujur, transparan, objektif, dan aktif sebagai media perubahan yang lebih baik dalam manajemen instansi pemerintah.

Rerangka Konseptual

Rerangka pemikiran merupakan suatu hubungan atau kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit. Maka dapat disusun rerangka konseptual seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2:



Gambar 1
Rerangka Konseptual



Gambar 2
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Determinan Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Penelitian sebelumnya pada Putra (2017) menyatakan bahwa penganggaran yang dapat dipertanggung jawabkan adalah penganggaran yang terukur dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Dengan ini maka pengimplementasian penganggaran dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat tercapai. Penganggaran yang efektif berarti tujuan yang akan dituju adalah strategis dan yang dimaksud dengan efisien yaitu untuk menuju tujuan yang strategis maka sumber daya yang dikeluarkan harus seminimal mungkin dengan tidak mengurangi kualitas yang ada. Untuk mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien, penganggaran berbasis kinerja inilah yang akan tepat untuk di implementasikan pada pengelolaan keuangan daerah.

Menurut peneliti sebelumnya Yani (2014) mengatakan bahwa implementasi penganggaran berhubungan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Putra (2017) mengungkapkan bahwa semakin tingginya nilai keefektifan penerapan penganggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula pertanggungjawaban manajerial yang akan meningkatkan pula nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tersebut. Pertanggungjawaban agen adalah hal yang paling penting diperhatikan dalam menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dari kinerja yang telah dicapai.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dirumuskan dengan hipotesis dibawah ini:

H₁ : Determinan penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Menurut Armando (2013) sistem pengendalian internal pada lingkup pemerintah ialah suatu proses pemberi keyakinan terhadap pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan dalam menerapkan undang-undang yang berlaku, serta penyajian laporan keuangan pemerintah yang tercermin dari nilai informasi laporan keuangan tersebut. Agar menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pimpinan pemerintahan harus melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pada suatu lingkup pemerintahan.

Pada dasarnya, segala bentuk pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kecurangan dan korupsi. Sistem pengendalian internal pemerintah digunakan untuk menggambarkan tentang tugas-tugas dan wewenang pemerintah daerah hingga pada akhirnya pemerintah mempunyai struktur organisasi yang jelas serta dianggap mampu untuk menyusun rencana pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengurangi risiko penyelewengan (Hardiningsih *et al.*, 2019). Dengan adanya sistem pengendalian internal pada lingkup pemerintah maka pemerintah akan lebih efektif dalam akuntabilitas pengelolaan keuangannya, misalnya pada proses pemeriksaan fisik seperti barang, kas, aset, catatan akutansi dan lain sebagainya yang digunakan sebagai hasil temuan atau *review* yang dijadikan bukti pemeriksaan pihak pemeriksa laporan keuangan. Aramide dan Bashir (2015) juga mengatakan adanya pengendalian internal dalam lingkup pemerintah yang optimal dapat dijadikan sebagai jaminan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara *continue* sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan dengan hipotesis dibawah ini:

H₂ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah kota.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Anggaran ialah sebuah komponen penting pada suatu penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana anggaran dinilai berdampak pada kinerja pemerintah dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat luas. Jika diartikan kejelasan sasaran anggaran merupakan kejelasan tujuan anggaran yang telah ditetapkan agar anggaran tersebut dapat mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran yang telah dibuat (Isnanto *et al.*, 2019). Sesuai dengan penjelasan diatas maka apabila tujuan anggaran yang dibuat sudah sesuai maka anggaran dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Putra (2017) menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Disebutkan penelitian terdahulu Yee *et al.*, (2016) juga mengungkapkan bahwa sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan manfaat kemudahan untuk proses penyusunan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Khairunnisa dan Efni (2018) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan uraian-uraian diatas maka dapat dinyatakan dengan hipotesis dibawah ini:
 H_3 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Damayanti (2017) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan segala sesuatu dalam menggunakan teknologi informasi. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah peningkatan kinerja dengan semakin dipermudahkannya dalam mengerjakan segala sesuatu menggunakan teknologi informasi yang ada. Sebagai salah satu contoh dalam manfaat menggunakan teknologi informasi ialah menghemat waktu dalam aksesibilitas saat proses membuat laporan keuangan karena adanya software yang membantu, hal ini membuat kinerja pelaporan keuangan semakin ekonomis dan efisien. Teknologi informasi menggunakan beberapa *software* dalam komputer untuk pemrosesan penyimpanan yang juga memiliki fungsi sebagai media komunikasi untuk penyebaran informasi yang ada termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi sangatlah berperan dalam upaya peningkatan pelayanan di lingkup pemerintah yang nantinya akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Damayanti 2017). Dilihat dari kondisi pandemi yang sedang dialami di seluruh dunia yang mengakibatkan tidak dapatnya berkomunikasi secara langsung atau tatap muka membuat teknologi informasi sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh seluruh kalangan untuk mengerjakan pekerjaannya masing masing. Dapat di simpulkan bahwa pentingnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan kinerja tidak terkecuali di lingkup pemerintahan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (Mardjiono 2009). Dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan dengan hipotesis dibawah:

H_4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sample Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan data primer. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian yang mempunyai tujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini sejauh mana pengaruh penerapan penganggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan judul dan perumusan hipotesis yang telah ditentukan, penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif yang merupakan penelitian yang mempunyai karakter masalah berupa sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas Kota Surabaya yang berjumlah 22 unit.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan karena kriteria responden telah ditentukan maka informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih sesuai karakter tersebut. Sesuai dengan dengan objeknya, kriteria sampel yang dipilih didasari dengan kepala bagian dan staf bagian keuangan merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis saat pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Instansi	Kuisisioner	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	22
2	Kepala subbagian/Bagian	1	22
3	Sekretariat dan Staff Keuangan	2	44
	Total	4	88

Sumber Data: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas, penelitian ini mengambil 22 Dinas Kota Surabaya yang pada masing-masing dinas akan diberikan 4 kuisisioner. Sehingga nantinya akan terkumpul jumlah sampel sebanyak 88 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data subjek yaitu jenis data yang berupa opini, sikap dan pengalaman seseorang atau sebuah kelompok yang dijadikan subjek penelitian. Data subjek dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner yang disebarkan secara langsung kepada responden. Sedangkan sumber data yang di ambil dalam penelitian ini ialah data primer, dimana data primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh responden yang menjadi sasaran penelitian yang sudah di tentukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah metode survey yang berarti metode pengumpulan yang menggunakan survey sebagai media kuisisioner. Kuisisioner tersebut berisikan tentang pernyataan-pernyataan yang terstruktur dan diserahkan secara langsung oleh peneliti kepada responden untuk diisi. Kuisisioner menggunakan skala Likert lima poin. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban, sebagai berikut :

Sangat Setuju	(SS)	= 5
Setuju	(S)	= 4
Netral	(N)	= 3
Tidak Setuju	(TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 1

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) pendekatan kuantitatif berpondasikan pada filsafat positivisme yang akan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data, dengan bertujuan untuk menguji hipotesis

yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang berarti variabel independen (bebas) akan dianalisis dengan satu variabel dependen (terikat). Pada analisis regresi nantinya tidak hanya mengukur sebesar apa variabel dependen terpengaruhi oleh variabel independen, namun juga hubungan yang ada antara variabel dependen dengan variabel independennya sehingga pada penelitian ini akan nampak perbedaan daripada variabel dependen dan independen tersebut.

Uji Validitas

Sugiyono (2017:198) mengatakan bahwa validitas merupakan suatu ketepatan antara data yang telah terjadi pada obyek penelitian dengan data-data yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang telah valid adalah data yang telah terbukti benar dan tepat dengan data yang dibutuhkan pada penelitian. Uji validitas akan memperlihatkan signifikansi koefisien korelasi antara masing-masing item pertanyaan terhadap total skor variabel. Menurut Ghozali, 2016:53 (dalam Salekha 2020) penentuan uji validitas yaitu: (a) jika r hitung $> r$ tabel, maka dikatakan valid, dan (b) jika r hitung $\leq r$ tabel, maka dikatakan tidak valid. Nilai probabilitas dapat dikatakan signifikan jika $p < 0,01$ atau $p < 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang mengukur sejauh mana jawaban kuisioner memiliki konsistensi yang dapat digunakan saat waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Alfa Cronbach*, dengan kriteria *Alfa Cronbach* dari masing-masing variabel lebih dari 0,60 maka alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam penilaian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, yaitu (1) jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka distribusi data dapat dikatakan normal, dan (2) sebaliknya apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka dikatakan tidak normal (Ghozali, 2016: 154). Uji normalitas ini dapat dilakukan juga dengan uji statistik dan analisis grafik. Analisis grafik dapat mendeteksi normalitas dengan cara melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik Normal Probability Plot, dengan ketentuan dibawah ini: (a) Jika data (titik-titik) berada dekat atau mengikuti garis sumbu diagonalnya, maka nilai residual terdistribusi normal, (b) Jika data (titik-titik) menjauh dan tidak mengikuti sumbu diagonalnya, maka nilai residualnya tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel independen lainnya dapat diukur dengan nilai cut off multikolinieritas, dengan ketentuan jika *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka akan terjadi multikolinieritas, dan jika nilai *tolerance* < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016:103). Dalam menguji multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dengan ketentuan jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ maka terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya jika nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual pengamatan lain adalah sama, maka terjadi homoskedastisitas. Metode yang dipakai ialah grafik scatterplot antara lain prediksi variabel dependen, yaitu jika data

(titik-titik) menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasar masukan variabel independen yang ada.

Selain menggunakan metode scatterplot, pada penelitian ini digunakan uji Glejser. Dimana meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansinya diatas 5% maka dapat dikatakan signifikan (Ghozali, 2016:142).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dalam analisis ini yang diuji ialah penganggaran berbasis kinerja, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi. Maka persamaan regresi linier berganda dapat diturunkan sebagai berikut:

$$AKP = a + b_1PA + b_2SPI + b_3KSA + b_4TI + e$$

Keterangan:

AKP : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

α : Konstanta

PA : Penganggaran

SPI : Sistem Pengendalian Internal

KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran

TI : Teknologi Informasi

b_1 : Koefisien Penganggaran berbasis Kinerja

b_2 : Koefisien Sistem Pengendalian Internal

b_3 : Koefisien Kejelasan Sasaran Anggaran

b_4 : Koefisien Teknologi Informasi

e : Error

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menguji secara simultan apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian secara simultan yang diajukan oleh Sugiyono (2017:284) dapat dilihat dari tingkat signifikan $\alpha=0,05$ atau 5%, antara lain: (a) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka berarti variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, (b) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka berarti variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai $R^2=0$ berarti variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi variabel dependen dan nilai $R^2=1$ berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji seberapa jauh variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018:98-99). Kriteria pengujian secara parsial yang diajukan oleh Sugiyono (2017:288-289) dapat dilihat dari tingkat $\alpha=0,05$ atau 5%, yaitu: (a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, (b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviation
PA	88	3,60	5,00	4,1000	,30324
SPI	88	3,60	5,00	4,0977	,33767
KSA	88	3,40	5,00	4,1568	,34634
TI	88	3,20	5,00	3,9886	,37183
AKP	88	3,40	5,00	4,1295	,34179

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 tentang hasil uji statistik deskriptif pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini bahwa jumlah (N) data yang sah untuk diolah adalah 88 responden yang dapat diartikan tidak ada data yang rusak atau tidak dapat diolah dikarenakan seluruh data yang didapat dinyatakan sah untuk diolah, pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa:

Hasil uji statistik deskriptif variabel penganggaran memiliki nilai minimum 3,60 dan nilai maximum sebesar 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) yang di dapatkan adalah 4,1000 dengan nilai standart deviasi adalah 0,30324. Hasil dari uji deskriptif variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai minimum 3,60 dan memiliki nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan adalah 4,0977 dengan nilai standart deviasi sebesar 0,33767. Hasil dari uji deskriptif variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai maksimum 5,00 dan minimum 3,40. Nilai rata-rata (*mean*) pada variabel kejelasan sasaran anggaran adalah 4,1568 dengan nilai standart deviasi sebesar 0,34634. Hasil uji statistik pada variabel teknologi informasi mempunyai nilai maksimum 5,00 dan mempunyai nilai minimum 3,20. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,9886 dengan nilai standart deviasi 0,3183. Hasil uji statistik pada variabel akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki nilai minimum 3,40 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata pada variabel akuntabilitas kinerja pemerintah adalah 4,1295 dengan standart deviasi yang bernilai 0,34179.

Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara tiap skor total yang menjadi jumlah dari setiap skor dengan menggunakan *corrected item-total correlattion*. Hasil Uji Validitas Penganggaran

Tabel 3
Hasil Uji Validitas
Variabel Penganggaran

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Valid	Keterangan
PA1	0,648	0,2096	VALID
PA2	0,598	0,2096	VALID

PA3	0,678	0,2096	VALID
PA4	0,748	0,2096	VALID
PA5	0,568	0,2096	VALID

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator pada variabel penganggaran secara keseluruhan memiliki *corrected item-total correlation* diatas 0,2096 dengan itu variabel penganggaran bisa dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel 4
Hasil Uji Validitas
Variabel Sistem Pengendalian Internal

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Valid	Keterangan
SPI1	0,643	0,2096	VALID
SPI2	0,644	0,2096	VALID
SPI3	0,700	0,2096	VALID
SPI4	0,707	0,2096	VALID
SPI5	0,718	0,2096	VALID

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa indikator pada variabel sistem pengendalian internal dapat dikatakan valid secara keseluruhan karena memiliki *item-total correlation* diatas 0,2096.

Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

Tabel 5
Hasil Uji Validitas
Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Valid	Keterangan
KSA1	0,559	0,2096	VALID
KSA2	0,767	0,2096	VALID
KSA3	0,569	0,2096	VALID
KSA4	0,711	0,2096	VALID
KSA5	0,640	0,2096	VALID

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dilihat dari Tabel 5 tentang hasil uji validitas pada variabel kejelasan sasaran anggaran nilai *corrected item-total correlation* menunjukkan angka diatas 0,2096. Hal ini dapat diartikan bahwa indikator pada variabel kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Teknologi Informasi

Tabel 6
Hasil Uji Validitas
Variabel Teknologi Informasi

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Valid	Keterangan
TI1	0,684	0,2096	VALID
TI2	0,769	0,2096	VALID
TI3	0,682	0,2096	VALID
TI4	0,591	0,2096	VALID
TI5	0,739	0,2096	VALID

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator variabel teknologi informasi memiliki *corrected item-total correlation* diatas 0,2096 maka dengan ini dapat dinyatakan valid.

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 7
Hasil Uji Validitas
Variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Valid	Keterangan
AKP1	0,686	0,2096	VALID
AKP2	0,652	0,2096	VALID
AKP3	0,771	0,2096	VALID
AKP4	0,654	0,2096	VALID
AKP5	0,670	0,2096	VALID

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Pada Tabel 7 menunjukkan nilai *corrected item-total correlattion* diatas 0,2096 dengan itu dapat diartikan indikator pada variabel akuntabilitas kinerja pemerintah dinyatakan valid secara keseluruhan.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas menggunakan kuisisioner yang dipakai dalam mengukur variabel dalam suatu penelitian. Kuisisioner tersebut daat dinyatakan *reliable* apabila jawaban responden konsisten dari awal hingga akhir. Menurut Ghozali (2016) apabila *cronbach alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan *reliable*, dan sebaliknya jika *cronbach alpha* < 0,60 maka dapat dikatakan tidak *reliable* atau *unreliable*.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Reliable	N of Items	Keterangan
Penganggaran	0,634	0,60	5	Reliable
Sistem Pengendalian Internal	0,696	0,60	5	Reliable
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,663	0,60	5	Reliable
Teknologi Informasi	0,732	0,60	5	Reliable
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0,716	0,60	5	Reliable

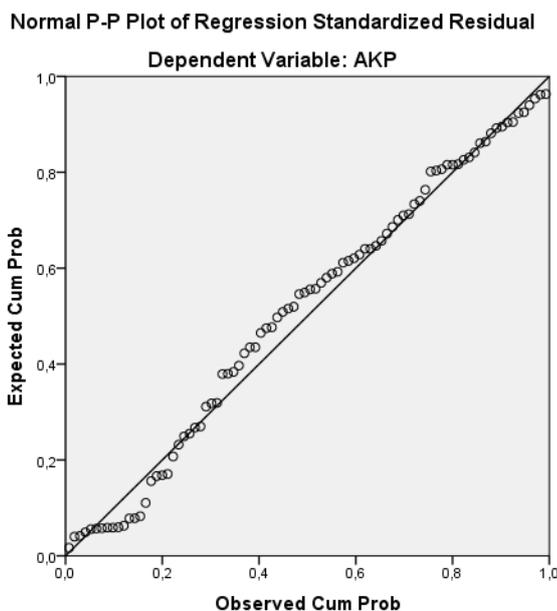
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel. dapat dilihat pada tabel diatas, pada varibel penganggaran nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,634, pada variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,696, pada variabel kejelasan sasaran anggaran mendapatkan nilai *cronbach's alpha* 0,663, sedangkan pada variabel teknologi informasi memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,732 dan pada variabel akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,716. Sehingga seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan *reliable* karena seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel yang diteliti memiliki distribusi yang normal atau tidak normal. Pada pengujian ini menggunakan normal probability plot. Hasil uji normalitas diperoleh sebagai berikut.



Gambar 3
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil grafik di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar diagonal dan mengikuti garis tersebut. Dengan itu dapat diartikan model regresi memenuhi asumsi normalitas dengan kata lain variabel yang diteliti memiliki penyebaran yang normal.

Cara lain dalam menguji normalitas yaitu dengan menggunakan *one sample kolmogrov sample smirnov*. Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel yang diteliti menyebar secara normal atau tidak normal dengan menggunakan metode *one sample kolmogrof sample smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi model regresi menyebar secara normal, (b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi model regresi menyebar secara tidak normal.

Tabel 9
Hasil Uji Kolmogrof Smirnov

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,066609249
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,070
	Negative	-,082
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai dari signifikansi $0,2 > 0,05$ maka model regresi telah terdistribusi dengan baik dan secara normal sehingga data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas yaitu suatu model pengujian yang mendeteksi apakah ada kolerasi antar variabel bebas atau variabel independen dalam model regresi. Apabila ditemukannya kolerasi dalam pengujiannya maka akan ditemukan *problem multikolinieritas*. Untuk

mendeteksi hal tersebut dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Varia Information Factors* (VIF). Jika nilai *tolerance* dari model regresi < 0,1 serta nilai *Varian Information Factors*> 10 maka dapat diartikan dapat terjadi *problem multikolinieritas*.

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolelance	VIF
PA	,424	2,357
SPI	,365	3,743
KSA	,433	2,308
TI	,302	3,310

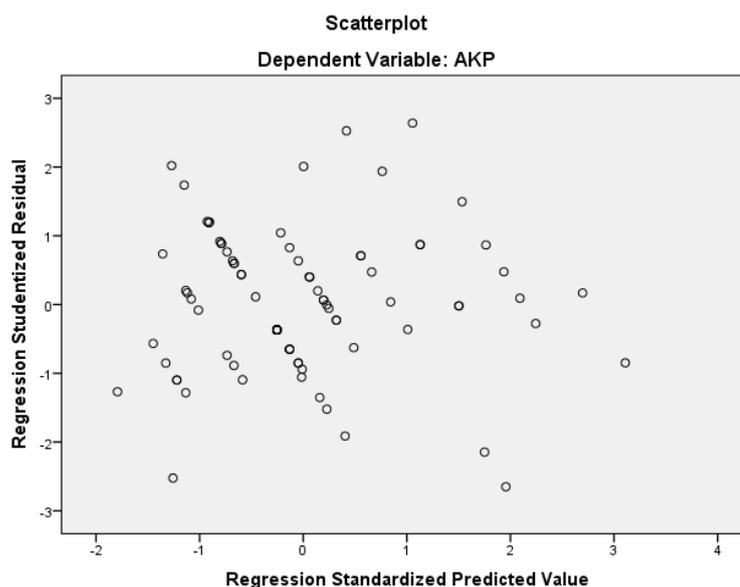
Dependent Variabel : AKP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa data yang diolah tidak mengandung multikolinieritas, hal ini ditunjukkan dengan nilai *Varian Information Factors* (VIF) dari seluruh variabel masing-masing dibawah angka 10, dan nilai *tolerance* pada uji multikolinieritas pada seluruh variabel independen > 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Ghozali (2016) memaparkan bahwa heteroskedastisitas terjadi apabila pada scatterplot mempunyai pola yang teratur, menyempit maupun melebar bahkan bergelombang. Jika titik scatterplot menyebar diatas maupun diatas pada sumbu Y atau titik origin dan mempunyai pola yang tidak teratur maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disebut homoskedastisitas.



Gambar 4
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan data grafik pada Gambar 4 diatas menunjukkan bahwa pola penyebaran titik-titik tidak beraturan dan titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga data pada model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disebut homoskedastisitas.

Tabel 11
Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
Constant	0,58	0.036	0,77	0,763	.446
PA	0,09	0,019	0,50	0,481	.632
SPI	0,017	0,017	0,35	0,977	.331
KSA	0,09	0,003	0,97	0,342	.733
TI	0,1	0,01	0,119	1,142	.256

Dependent variable: AKP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan uji glejser diatas, menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi dari variabel PA sebesar 0,632, variabel SPI sebesar 0,331, variabel KSA sebesar 0,733, variabel TI sebesar 0,256. Hasil regresi anatar variabel independen tidak ada yang signifikan (taraf signifikan > 0,05 atau 5%).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Teknologi Informasi sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Tabel dibawah ini merupakan data hasil uji analisis regresi linier berganda pada penelitian ini.

Tabel 12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

	Coefficients Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	Constant	0,918	1,075		0,854	.396
	PA	0,324	0,074	0,288	4,377	.000
	SPI	0,216	0,072	0,213	3,006	.004
	KSA	0,192	0,064	0,194	2,989	.004
	TI	0,327	0,072	0,356	4,569	.000

Dependent variable: AKP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Dari data Tabel 12 diatas dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{AKP} &= a + b_1\text{PA} + b_2\text{SPI} + b_3\text{KSA} + b_4\text{TI} + e \\ \text{AKP} &= 0,918 + 0,324\text{PA} + 0,216\text{SPI} + 0,192\text{KSA} + 0,327\text{TI} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

b_1, b_2, b_3, b_4 : koefisien regresi masing-masing variabel independen

a : Bilangan Konstanta

PA : Penganggaran

SPI : Sistem Pengendalian Internal

KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran
 TI : Teknologi Informasi
 e : Standart error

Konstanta

Konstanta yang ada pada persamaan regresi linier berganda diatas menunjukkan angka 0,918 sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Koefisien Penganggaran

Pada Tabel 12 diatas dapat disimpulkan bahwa penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dengan nilai koefisien sebesar 0,324

Koefisien Sistem Pengendalian Internal

Koefisien sistem pengendalian internal sebesar 0,216 sehingga dapat diartikan dari Tabel 12 diatas bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Koefisien Kejelasan Sasaran Anggaran

Koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,192 sehingga dapat diartikan dari Tabel 12 diatas bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Koefisien Teknologi Informasi

Koefisien teknologi informasi berdasarkan Tabel 12 diatas sebesar 0,327 maka dapat diartikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja kota surabaya.

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 13
Hasil Uji F
ANOVA

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	215,479	4	53,870	115,834	,000 ^b
	Residual	38,600	83	,465		
	Total	254,080	87			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 13 diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, dan teknologi informasi secara simultan mempengaruhi variabel akuntabilitas kinerja pemerintah dengan bukti nilai signifikansi pada penelitian ini yaitu $0,000 < 0,05$.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 14
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	,921 ^a	,948	,941	,68195

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 14 diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,941 sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah dipengaruhi oleh variabel penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan teknologi informasi sebesar 0,941 atau 94,1% sedangkan sisanya 0,059 atau 5,9% dipengaruhi variabel lainnya diluar model.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 15
Hasil Uji t
Coefficients^a

	Coefficients Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	Constant	0,918	1,075		0,854	.396
	PA	0,324	0,074	0,288	4,377	.000
	SPI	0,216	0,072	0,213	3,006	.004
	KSA	0,192	0,064	0,194	2,989	.004
	TI	0,327	0,072	0,356	4,569	.000

Dependent variable: AKP

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 15 diatas menunjukkan hasil uji t pada variabel independen penelitian yaitu penganggaran, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, teknologi informasi terhadap variabel dependen penelitian yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengujian Terhadap Variabel Penganggaran

Pada Tabel 15 hasil uji t pada variabel penganggaran memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 4,377. Dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengujian Terhadap Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Pada Tabel 15 hasil uji t pada variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai signifikansi 0,004 dengan nilai t hitung sebesar 3,006. Dimana nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengujian Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Internal

Pada Tabel 15 hasil uji t pada variabel pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi 0,004 dengan nilai t hitung sebesar 2,989. Dimana nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengujian Terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Tabel 15 hasil uji t pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 4,569. Dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Determinan Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah yang pada penelitian ini berobjek pada 22 Dinas Kota Surabaya. Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial variabel penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah diketahui nilai t hitung 4,377 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesis satu yang menyatakan determinan penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota diterima. Penganggaran yang dapat dipertanggung jawabkan adalah penganggaran yang terukur dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Dengan ini maka determinan penganggaran dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis yang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Semakin tingginya nilai keefektifan penerapan penganggaran berbasis kinerja maka semakin tinggi pula pertanggungjawaban manajerial yang akan meningkatkan pula nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tersebut. Pertanggungjawaban agen adalah hal yang paling penting diperhatikan dalam menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dari kinerja yang telah dicapai. Dengan dirancangnya program-program yang mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dengan memperhatikan target masing masing program yang dicapai merupakan langkah menuju akuntabilitas kinerja. Dimana setiap periode anggaran harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu pula. Pencapaian target kerja yang telah ditentukan oleh suatu instansi/lembaga merupakan fokus utama dalam perealisasi anggaran yang ada, jika dalam suatu instansi/lembaga tidak memfokus utamakan target kerja yang telah ditentukan sebelumnya maka akuntabilitas kinerja tidak dapat tercapai. Anggaran yang dikeluarkan juga harus diatur secara rasional dan dapat dipercaya pada setiap periode.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya pada Yani (2014) dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh penganggaran sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel dependen.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah yang pada penelitian ini berobjek pada 22 Dinas Kota Surabaya. Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial variabel penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah diketahui nilai t hitung 3,006 dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ yang berarti hipotesis satu yang menyatakan Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah kota diterima. Pada dasarnya, segala bentuk pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kecurangan dan korupsi. Sistem pengendalian internal pemerintah digunakan untuk menggambarkan tentang tugas-tugas dan wewenang pemerintah daerah hingga pada akhirnya pemerintah mempunyai struktur organisasi yang jelas serta dianggap mampu untuk menyusun rencana pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengurangi risiko penyelewengan. Dengan adanya sistem pengendalian internal pada lingkup pemerintah maka pemerintah akan lebih efektif dalam akuntabilitas pengelolaan keuangannya, misalnya pada proses pemeriksaan fisik seperti barang, kas, aset, catatan akuntansi dan lain sebagainya yang digunakan sebagai hasil temuan atau *review* yang dijadikan bukti pemeriksaan pihak pemeriksa laporan keuangan. Diterapkannya peraturan bahwa sistem pengendalian internal yang terjadwal juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Tidak hanya peraturan, namun pengecekan fisik secara berkala juga merupakan salah satu cara untuk mencapai akuntabilitas kinerja. Rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek dalam suatu instansi/lembaga dapat digunakan untuk *decision making* atau pengambilan keputusan baik financial maupun nonfinancial.

Hasil ini mendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armando (2013), Aramide dan Bashir (2015), Hardiningsih *et al.*, (2019) yang menyatakan pengaruh sistem pengendalian internal sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai variabel dependen.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran (variabel independen) terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (variabel dependen). Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian dengan variabel tersebut memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ dengan nilai *t* hitung sebesar 3,006. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan pengaruh kejelasan sasaran terhadap akuntabilitas kinerja diterima. Kejelasan sasaran yang telah disusun harus menjadi suatu acuan oleh pekerja atau karyawan dimana didalamnya dapat membantu pekerja dalam menyelesaikan tugasnya. Anggaran dinilai berdampak pada kinerja pemerintah dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat luas. Jika diartikan kejelasan sasaran anggaran merupakan kejelasan tujuan anggaran yang telah ditetapkan agar anggaran tersebut dapat mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran yang telah dibuat. Sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan manfaat kemudahan untuk proses penyusunan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan hal-hal yaitu anggaran yang memiliki ciri yang jelas pada sasaran anggaran yang akan dituju, dimana hal ini dapat membantu untuk menyusun target anggaran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik secara otomatis akuntabilitas organisasi tersebut akan meningkat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya yang dengan baik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Hasil ini mendukung penelitian yang sudah dilakukan oleh Isnanto *et al.*, (2019), Putra (2017), Yee *et al.*, (2016), Khairunnisa dan Efni (2018) yaitu memaparkan hasil penelitiannya bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah yang pada penelitian ini berobjek pada 22 Dinas Kota Surabaya. Berdasarkan hasil uji *t* atau uji parsial variabel penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah diketahui nilai *t* hitung 4,569 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesis satu yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota diterima. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan sering dikenal sebagai *E-Government*, pemerintah digital, pemerintah online bahkan pemerintah transformasi. Teknologi informasi menyediakan berbagai macam informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya, teknologi informasi dapat memberikan informasi untuk dasar pengambilan keputusan untuk kelangsungan bisnis kedepannya. Hal ini masih terus dikembangkan dengan harapan teknologi informasi dapat berguna untuk membantu proses pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dengan waktu yang singkat atau ekonomis. Dilihat dari kondisi pandemi yang sedang dialami di seluruh dunia yang mengakibatkan tidak dapatnya berkomunikasi secara langsung atau tatap muka membuat teknologi informasi sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh seluruh kalangan untuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan kinerja tidak terkecuali di lingkup pemerintahan.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mardjiono (2009), Damayanti (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Determinan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Karena sistem penganggaran yang memiliki prinsip 3E yaitu Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis serta memperhatikan target yang telah ditentukan sebelumnya semakin berdampak baik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, (2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Karena dalam pelaksanaan sebuah kegiatan perlulah adanya pengendalian terhadap problematika yang dihadapi baik yang sudah terjadi maupun problematika yang masih akan terindikasi, dengan demikian pengendalian internal instansi dapat meningkatkan kinerja instansi tersebut, (3) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Karena dengan kejelasan dalam suatu program kerja atau kegiatan tertentu dalam satu periode anggaran dapat membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan ini akan berdampak baik pada kinerja instansi atau pemerintah, (4) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Karena di era yang sudah modern ini, setiap kegiatan dibantu dengan teknologi informasi akan lebih mudah dan cepat dalam penyelesaiannya. Maka dengan itu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada akan berdampak baik pada kinerja instansi atau pemerintah.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan pokok bahasan yang dapat menunjang teori dan dapat memperluas kemampuan eksploratif dalam menulis penelitiannya. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah objek pada penelitiannya tidak sebatas 22 dinas Kota Surabaya namun lebih banyak dan lebih luas lagi, sehingga hasil yang di dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas sehingga peneliti selanjutnya dapat menjalankan rencananya sesuai dengan yang diinginkan. Bagi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal agar kinerja pemerintah dapat dinilai baik pula oleh principals atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aramide, S. F. dan M. M. Bashir. 2015. The Effectivness Of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Negeria. *International Journal of Reserch in Bussines Management Invention* 2(1): 16-23.
- Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*: 1(1)
- Damayanti. S. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang). *Skripsi*. Program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 33*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Hardiningsih, P., Meita. R., Srimindarti. C, dan I. Kristiana. 2019. Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *AKTSAR*, 2(1): 21-42.
- Indrisari, D., dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak*.
- Isnanto, Y., Suharno dan B. Widarno. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15: 489-501.
- Khairunnisa dan Efni. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Tapak Manajemen Bisnis* 10(1): 64-78.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardjiono, Didik Eko. 2009. Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Pemanfaatan TI dan Implementasi Struktur Organisasi yang Terdesentralisasi terhadap Kinerja Organisasi. Studi pada RSUD Kab.Temanggung. *Tesis*. Universitas Padjajaran.
- Putra, A. P. 2017. Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *Ekuitas: jurnalekonomi dan keuangan volume* 2(2): 271-290
- Pratiwi, R. D. dan L. Setyowati. 2017. Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*24 (1), Hal.94-192.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2005, Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sofiani, M. dan E. D. Retnani. 2019. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: 8(11)
- Salekha, L. 2020. Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Skripsi. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Yani, F. 2014. Pengaruh APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi* 1(2).
- Yee, C.M., E.W.S. Khin, dan K. Ismail. 2016. An Analysis of Budgetary Goals Impacting Organization Performance. *Audit Financier* 14(137): 551-563